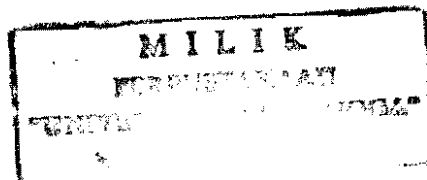


SKRIPSI

HARIYANTO SETIAWAN

PENYELESAIAN KREDIT MACET BANK MELALUI PENGADILAN

Kk.
per. 24/99.
Set
P.



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

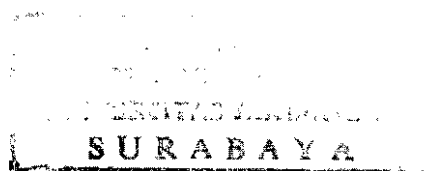
1998

PENYELESAIAN KREDIT MACET BANK MELALUI PENGADILAN

kk
per. 24/99.
Set.
f.

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**



Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Handajani".

Sri Handajani, S.H., M.Hum

NIP. 130 809 069

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hariyanto Setiawan".

Hariyanto Setiawan

NIM. 039413936

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1998

Telah diuji dihadapan Panitia Penguji pada tanggal : 30 Desember 1998

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Moh. Imaneni, S.H., MS.

Anggota : Sri Handayani, S.H., M.Hum.

Hj. Moerdiati, S.H., MS.

Lisman, S.H., M.S.

Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.

Berdasarkan pada uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bank dalam menyelesaikan kredit macetnya yang dari tahun ke tahun semakin besar jumlahnya dengan menggunakan sarana pengadilan dapat melakukan upaya-upaya yang disediakan hukum. Upaya-upaya tersebut terdiri atas somasi, permohonan eksekusi grosse akta hipotik dan surat pengakuan hutang notariil, pengajuan gugatan yang disertai dengan permohonan sita jaminan, dan perjanjian perdamaian. Upaya hukum yang pertama, yaitu somasi dapat dilakukan oleh bank, apabila dalam perjanjian kredit tidak ditentukan jangka waktu pelunasan hutang/kredit oleh debitur, dan kekuatan dari somasi dalam menyelesaikan kredit macet tergantung pada itikad baik dari debitur. Dan upaya hukum yang kedua adalah permohonan eksekusi grosse akta hipotik dan surat pengakuan hutang notariil. Upaya ini dapat dilakukan oleh bank apabila sebelumnya dalam perjanjian kredit, bank telah membebani barang agunan milik debitur dengan hipotik, dan dalam taraf penyelesaian kredit, yaitu melelang barang agunan milik debitur, bank harus memperoleh persetujuan dari pengadilan terlebih dahulu, tanpa melakukan proses persidangan. Serta upaya hukum yang ketiga adalah pengajuan gugatan yang disertai dengan sita jaminan.

Upaya ini dapat dilakukan oleh bank, apabila dengan cara somasi atau atas kekuatan dari perjanjian kredit, yaitu telah ditentukannya jangka waktu pelunasan kredit dalam perjanjian, debitur tetap tidak mau melunasi hutangnya sedangkan debitur sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dapat dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan oleh debitur. Dan untuk menjamin akan dikabulkannya surat gugatan bank oleh pengadilan, maka bersama-sama dengan surat gugatan dapat disertakan permohonan sita jaminan terhadap barang milik debitur. Upaya yang keempat dari bank dalam menyelesaikan kredit macet melalui pengadilan adalah dengan perdamaian di pengadilan. Upaya ini dapat dilakukan oleh bank apabila debitur setuju melakukan perdamaian di pengadilan tanpa harus menempuh proses peradilan.

- b. Di dalam praktek penyelesaian kredit macet melalui pengadilan, bank seringkali mengalami hambatan-hambatan yang menyebabkan sulitnya untuk menarik kembali kredit yang telah disalurkan kepada debitur. Hambatan-hambatan tersebut meliputi hambatan yang terkait dengan proses pengadilan, yaitu prosesnya sangat lama dan sikap apriori dari pengadilan, dan hambatan yang terkait dengan eksekusi agunan, yaitu campur tangannya Mahkamah Agung di luar proses pengadilan, serta hambatan yang terkait dengan eksekusi grosse akta perjanjian kredit ex pasal 224 HIR, yaitu adanya perbedaan penafsiran antara dunia perbankan dan kalangan notaris, dengan Mahkamah Agung R.I, terhadap substansi dari pasal 224 HIR.

2. Saran.

- a. Dari upaya-upaya yang disediakan oleh hukum kepada bank dalam menyelesaikan kredit macetnya melalui pengadilan, perlu diupayakan somasi/teguran terlebih dahulu kepada debitur sebelum upaya pengajuan gugatan di pengadilan, dalam hal bank tidak menentukan jangka waktu pelunasan kredit. Hal ini karena disamping somasi dapat dijadikan bukti autentik di depan persidangan, dimungkinkan debitur dengan itikad baik mau memenuhi/melunasi kreditnya setelah mendapatkan teguran atau somasi dari pengadilan. Dalam hal jangka waktu pelunasan kredit telah ditentukan secara tegas dalam perjanjian kredit, perlu juga diupayakan penyelesaian kreditnya dengan cara perdamaian di depan pengadilan. Hal ini karena dengan perjanjian perdamaian akan terhindarkan dari proses penyelesaian perkara di persidangan yang telah memakan waktu yang sangat panjang, dan kekuatan putusan perdamaian sama dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan, dalam hal penyelesaian perkara (kredit macet) dengan menggunakan permohonan eksekusi grosse akta hipotik dan surat hutang notariil, maka bank dalam pembuatan grosse akta hipotik dan surat hutang notariil ex pasal 224 HIR harus mengacu pada syarat-syarat formal dan syarat-syarat materiil yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusannya yang terjadi dalam praktek. Dengan berpedoman pada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik

Indonesia tersebut, bank dapat melakukan eksekusi penjualan lelang terhadap barang milik debitur yang telah dijadikan agunan/jaminan.

- b. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi bank dalam menyelesaikan masalah kredit macetnya melalui pengadilan diharapkan aparat penegak hukum, khususnya para hakim untuk memiliki mutu etos, profesionalisme, dan dedikasi yang tinggi. Dengan sifat yang demikian, maka sikap apriori dalam menyelesaikan perkara antara bank dan nasabah debitur, dan sikap campur tangan di luar proses peradilan terhadap pelaksanaan eksekusi agunan/jaminan tidak akan terjadi kembali, serta asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang ringan dapat terwujud.